

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENYUSUNAN APBD
DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS APBD**
(Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015)

Dince Suci Lestari¹⁾

Andewi Rakhmawati²⁾

¹⁾ Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Riau

²⁾ Dosen Program Pascasarjana Universitas Riau

Abstract. *This study aims to identify and analyze the effect of executive and legislative relations, public transparency, public participation, and educational background on budget process and budget quality of budget process as an intervening variable. The population in this study was the Riau provincial government as the executive, Riau Provincial Assembly Members as the legislatives and the Non Governmental Organization (NGO) as the representative of the community. The number of samples in this study were 145 samples with purposive sampling method. There were 125 respondents who had returned the questionnaire. The analysis tool used was path analysis. Results of the analysis showed that executive and legislative, public transparency, and educational background direct affects the budget quality. Furthermore, there were no significant effect of community participation. While this study showed that the budget process is able to mediate effect of executive and legislative relations, public transparency, and educational background on the budget quality, but the budget process is unable to mediate public participation on the budget quality.*

Keywords: *budget process, budget quality, executive and legislative relations, public transparency, public participation, and educational backgrounds*

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem tata kelola pemerintah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir. Dalam kurun waktu yang relatif singkat pemerintah Indonesia telah melewati serangkaian reformasi sektor publik, khususnya reformasi manajemen keuangan daerah. Meskipun reformasi manajemen keuangan sektor publik di Indonesia ini sedikit terlambat dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Selandia Baru, namun dapat dikatakan reformasi ini mengalami kemajuan yang pesat.

Reformasi manajemen keuangan daerah ini ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dimulai 1 Januari 2001. Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesajahteraan masyarakat, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut dapat tercapai, salah satunya apabila manajemen keuangan (anggaran) dilaksanakan dengan baik. Anggaran keuangan adalah alat atau instrumen yang dipakai oleh

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENYUSUNAN APBD DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS APBD

(Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015)

Kepala Daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada dibawah kendali Kepala Daerah (KDH) selaku Kepala Eksekutif.

APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Perda. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.

APBD sangat penting bagi daerah yaitu sebagai pedoman dan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam jangka waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) termasuk kategori kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam operasional anggaran sedangkan perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi keuangan.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun berikutnya mengikuti sebuah siklus yang dimulai pada bulan Januari dan berakhir

pada bulan Desember dalam tahun anggaran yang sedang berjalan.

Penyusunan RAPBD tersebut dibagi menjadi tiga periode, dimana pada caturwulan pertama (bulan Januari-April) disusun RKPD yang didasarkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), indikatif tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Selanjutnya pada periode kedua (bulan Mei-Agustus) berdasarkan RKPD yang berpedoman pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) disusun KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA). KUA dan PPA menjadi dasar SE-KDH yang ditujukan kepada SKPD sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-SKPD yang berdasarkan pada Renja SKPD. Pada periode terakhir (bulan September-Desember) disusun Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD yang didasarkan pada himpunan RKA-SKPD. Penetapan Raperda APBD menjadi Perda APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran yang sedang berjalan.

Menurut Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 penyusunan APBD tahun anggaran 2016 didasarkan prinsip yaitu: sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, tertib, tepat waktu, transparan, partisipatif, dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Namun dalam implementasinya masih terdapat hambatan yang membuat proses penyusunan APBD ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip penyusunan APBD dikarenakan kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENYUSUNAN APBD DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS APBD

(Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015)

Analisa (2014) mengatakan bahwa Mendagri meminta agar APBD Riau diteliti kembali dan dikonsultasikan dengan DPRD. Pasalnya, diduga ada indikasi pemalsuan APBD Riau tahun 2015 yang dilakukan Annas Maamun untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. APBD yang dibahas dan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi tidak sama dengan draft yang dibahas DPRD dengan Gubernur.

Menurut Usman dan Triono Hadi (2014) dalam hasil analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau terkait alokasi anggaran ditemukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang lebih tinggi pada APBD tahun 2013 Provinsi Riau. Seperti anggaran pendidikan yang tidak mencukupi 20% dari total APBD, padahal dalam pasal 49 ayat 1 bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/APBD. Sementara APBD Provinsi hanya menyalurkan anggaran pendidikan sebesar Rp.1.309.248.309.200,- atau 15% dari total APBD yaitu sebesar Rp. 8.432.096.315.490. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan adalah sebesar Rp. 1.686.419.263.098.

Dari total anggaran pendidikan yang digelontorkan tersebut masih termasuk belanja gaji dan operasional pendidikan

kedinasan. Jika dihitung kembali secara rinci maka alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk pendidikan diluar gaji pendidik dan pendidikan kedinasan hanya 12% dari total APBD. Dengan demikian maka anggaran pendidikan masih jauh dibawah angka sesungguhnya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan yang mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD diluar gaji dan pendidikan kedinasan.

Selanjutnya, anggaran kesehatan sesuai dengan pasal 171 UU nomor 36 tahun 2009 mengamanatkan bahwa anggaran kesehatan minimal 10 % dari APBN/APBD diluar gaji. Sementara pemerintah Provinsi Riau menganggarkan hanya 6% dari total APBD Rp. 8.432.096.315.490. Jika dihitung kembali dikeluarkan biaya gaji maka belanja fungsi kesehatan hanya 4% dari total APBD.

Menurut analisis FITRA Riau diketahui bahwa belanja dalam APBD Provinsi Riau terus meningkat setiap tahunnya. Namun meningkatnya APBD Provinsi Riau ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan pemerintah untuk menyerap anggaran. Hal itu dibuktikan dengan besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan yang terus meningkat dari tahun ketahun seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1.
SILPA Tahun Berjalan APBD Provinsi Riau Tahun 2010 – 2015 Realisasi

| No. | Tahun | Realisasi APBD (Rp.) | SILPA Tahun Berjalan (Rp.) |
|-----|-------|----------------------|----------------------------|
| 1. | 2010 | 4.305.465.216.039,94 | 405.742.927.144,25 |
| 2. | 2011 | 5.440.440.485.157,83 | 1.339.381.568.287,55 |
| 3. | 2012 | 6.847.315.819.648,20 | 1.977.801.269.083,11 |
| 4. | 2013 | 6.994.646.204.554,06 | 1.447.676.413.281,87 |
| 5. | 2014 | 8.132.409.891.832,53 | 3.981.422.303.363,74 |
| 6. | 2015 | 6.911.044.805.838,19 | 3.131.883.624.997,25 |

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Riau

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENYUSUNAN APBD DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS APBD

(Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015)

Meningkatnya APBD, seyogyanya memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat. Namun realita diatas menunjukkan bahwa pemerintah Riau tidak mampu menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya.

Dalam RKA yang diajukan oleh SKPD pagu anggaran dibuat jauh lebih besar dari anggaran yang dibutuhkan disetiap program (mark up). Sehingga mengakibatkan pengembalian anggaran dari sisa program yang dilaksanakan cenderung tinggi dan akhirnya kembali ke kas daerah untuk dipergunakan pada tahun berikutnya. Selain itu dengan pagu anggaran yang tinggi akan sangat mudah terjadinya kong kalikong antara pihak ketiga (pelaksana proyek) dengan pejabat yang berada di instansi tertentu.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mesdiyono (2008). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel penelitiannya. Pada penelitian terdahulu ada lima variabel independen dan satu variabel dependen, pada penelitian ini terdapat empat variabel independen, satu variabel dependen dan satu variabel intervening. Penelitian ini menggunakan kualitas APBD sebagai variabel dependen karena kualitas APBD pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu pada penelitian terdahulu alat analisis yang digunakan adalah analisis faktor dengan pendekatan analisis komponen utama (principal component analysis-PCA) sedangkan penelitian ini menggunakan analisis jalur (Path Analysis).

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Hubungan Eksekutif dan Legislatif terhadap

Kualitas APBD di Pemerintah Provinsi Riau periode 2015?

2. Bagaimana pengaruh Transparansi Publik terhadap Kualitas APBD di Pemerintah Provinsi Riau periode 2015?
3. Bagaimana pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kualitas APBD di Pemerintah Provinsi Riau periode 2015?
4. Bagaimana pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Kualitas APBD di Pemerintah Provinsi Riau periode 2015?
5. Bagaimana pengaruh Proses Penyusunan APBD terhadap Kualitas APBD di Pemerintah Provinsi Riau periode 2015?
6. Bagaimana pengaruh Hubungan Eksekutif dan Legislatif terhadap Kualitas APBD yang dimediasi oleh Proses Penyusunan APBD di Pemerintah Provinsi Riau periode 2015?
7. Bagaimana pengaruh Transparansi Publik terhadap Kualitas APBD yang dimediasi oleh Proses Penyusunan APBD di Pemerintah Provinsi Riau periode 2015?
8. Bagaimana pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kualitas APBD yang dimediasi oleh Proses Penyusunan APBD di Pemerintah Provinsi Riau periode 2015?
9. Bagaimana pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Kualitas APBD yang dimediasi oleh Proses Penyusunan APBD di Pemerintah Provinsi Riau periode 2015?

KERANGKA PENELITIAN DAN

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan setiap tahun dengan perda. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian atas

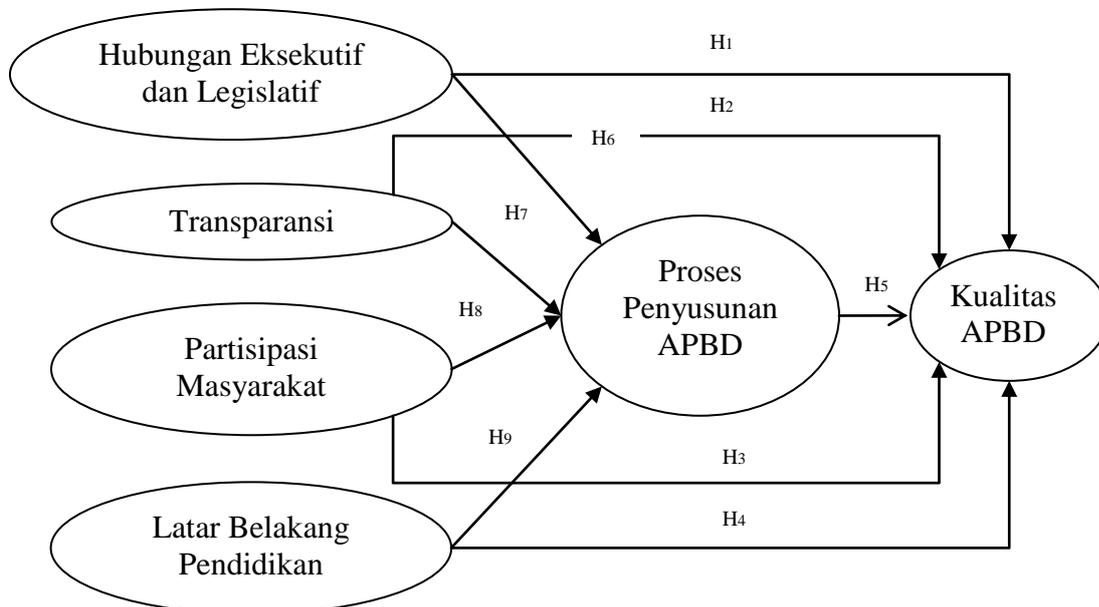
HIPOTESIS

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kualitas APBD adalah APBD yang proses penyusunannya mengedepankan prinsip akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan proses penyusunannya menggunakan pendekatan kinerja. Disamping itu beberapa literatur menjelaskan bahwa anggaran yang berkualitas adalah anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin (pro poor budget), berkeadilan (pro justice budget), dan tidak mendiskriminasikan dan menguntungkan gender tertentu (berspektif gender). Sehingga proses penyusunan APBD akan menghasilkan APBD yang berkualitas apabila prinsip-prinsip dalam proses penyusunan APBD tersebut diterapkan.

Namun dalam implementasinya masih terdapat hambatan yang membuat proses penyusunan APBD ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikarenakan kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Untuk lebih jelasnya hubungan antara variabel dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1.
Kerangka Penelitian



Hipotesis penelitian adalah:

- H1 : Hubungan eksekutif dan legislatif berpengaruh signifikan terhadap kualitas APBD
- H2 : Transparansi publik berpengaruh signifikan terhadap kualitas APBD
- H3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kualitas APBD
- H4 : Latar belakang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas APBD
- H5 : Proses penyusunan APBD berpengaruh signifikan terhadap kualitas APBD
- H6 : Hubungan eksekutif dan legislatif yang dimediasi oleh proses

penyusunan APBD berpengaruh signifikan terhadap kualitas APBD

- H7 : Transparansi publik yang dimediasi oleh proses penyusunan APBD berpengaruh signifikan terhadap kualitas APBD
- H8 : Partisipasi masyarakat yang dimediasi oleh proses penyusunan APBD berpengaruh signifikan terhadap kualitas APBD
- H9 : Latar belakang pendidikan yang dimediasi oleh proses penyusunan APBD berpengaruh signifikan terhadap kualitas APBD

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari tiga pihak yang terkait dalam proses penyusunan APBD, yaitu Pemerintah Provinsi Riau selaku pihak eksekutif, Anggota DPRD Provinsi Riau selaku pihak legislatif dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, organisasi

masyarakat, akademisi, mahasiswa dan media masa yang berada di wilayah Kota Pekanbaru selaku perwakilan dari masyarakat.

Teknik penentuan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sampling yang merupakan teknik penentuan sampel

dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.

Dalam penelitian ini pertimbangan khususnya untuk dijadikan sampel adalah pihak yg berkaitan langsung dalam proses penyusunan APBD Provinsi Riau. Berdasarkan teknik tersebut, maka rincian sampel dalam penelitian ini yaitu TAPD 10 responden, Bappeda 15 responden, BPKAD 10 responden, Dinas Pendapatan 15 responden, Dinas Pendidikan 10 responden, Dinas Kesehatan 10 responden, Inspektorat 10 responden, Sekretariat Daerah 10 responden, Bagian Anggaran DPRD 23 responden dan LSM 32 responden.

HASIL PENELITIAN

1. Statistik deskriptif

a. Pendeskripsian Identitas Responden Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil jawaban responden pada tabel 2 dibawah ini, rata-rata responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pria dengan rentang umur 36 – 45 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur sipil negara dan anggota DPRD yang terlibat dalam proses penyusunan APBD

Maka total sampel dalam penelitian ini berjumlah 145 sampel.

Dalam menganalisis dan menginterpretasi data, digunakan metode analisis deskriptif dan metode analisis verifikatif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dan variabel penelitian, sedangkan metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan uji statistik yang relevan. Sedangkan metode verifikatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Path Analysis* (analisis jalur) dengan alat bantu SPSS versi 20.

didominasi oleh pria dibandingkan wanita dengan rentang umur 36 – 45 tahun, dimana seseorang pada umur ini sudah memiliki pengalaman dan dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan sehingga menunjang pekerjaan mereka sebagai anggota legislatif dan eksekutif.

Tabel 2. Crosstabulation Umur dan Jenis Kelamin

| | | Jenis Kelamin | | Total | |
|-------|------------------------|------------------------|-----------|--------|-------|
| | | Perempuan | Laki-laki | | |
| Umur | < 20 | Count | 3 | 8 | 11 |
| | | % within Jenis Kelamin | 6,5% | 10,1% | 8,8% |
| | 20-25 | Count | 7 | 8 | 15 |
| | | % within Jenis Kelamin | 15,2% | 10,1% | 12,0% |
| | 26-35 | Count | 12 | 17 | 29 |
| | | % within Jenis Kelamin | 26,1% | 21,5% | 23,2% |
| | 36-45 | Count | 21 | 34 | 55 |
| | | % within Jenis Kelamin | 45,7% | 43,0% | 44,0% |
| | > 45 | Count | 3 | 12 | 15 |
| | | % within Jenis Kelamin | 6,5% | 15,2% | 12,0% |
| Total | Count | 46 | 79 | 125 | |
| | % within Jenis Kelamin | 100,0% | 100,0% | 100,0% | |

Sumber : Hasil Uji SPSS Versi 20

b. Pendeskripsian Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil jawaban responden pada tabel 3. dibawah ini, rata-rata responden yang menjadi sampel adalah pria dengan latar belakang pendidikan S1, ini menunjukkan bahwa masing-masing

aparatur sipil negara dan anggota DPRD yang terlibat dalam proses penyusunan APBD yang menjadi responden telah memiliki latar belakang pendidikan yang mendukung dalam hal pekerjaan mereka.

Tabel. 3. Crosstabulation Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

| | | | Jenis Kelamin | | Total | |
|------------|----------|------------------------|------------------------|-----------|--------|--------|
| | | | Perempuan | Laki-laki | | |
| Pendidikan | SMA | Count | 4 | 5 | 9 | |
| | | % within Jenis Kelamin | 8,7% | 6,3% | 7,2% | |
| | D1,D2,D3 | Count | 18 | 21 | 39 | |
| | | % within Jenis Kelamin | 39,1% | 26,6% | 31,2% | |
| | S1 | Count | 21 | 34 | 55 | |
| | | % within Jenis Kelamin | 45,7% | 43,0% | 44,0% | |
| | S2 | Count | 3 | 19 | 22 | |
| | | % within Jenis Kelamin | 6,5% | 24,1% | 17,6% | |
| | Total | | Count | 46 | 79 | 125 |
| | | | % within Jenis Kelamin | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Sumber : Hasil Uji SPSS Versi 20

c. Pendeskripsian Identitas Responden Berdasarkan Lama Bekerja dan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil jawaban responden pada tabel 4. dibawah ini,pendeskripsian identitas responden berdasarkan lama bekerja dan jenis kelamin rata-rata responden adalah pria dengan lama bekerja 6-10 tahun, ini

menunjukkan bahwa masing-masing aparatur sipil negara yang menjadi responden telah memiliki pengalaman yang banyak karena telah lama bekerja ditempat mereka ditugaskan.

Tabel. 4. Crosstabulation Lama Bekerja dan Jenis Kelamin

| | | | Jenis Kelamin | | Total | |
|--------------|-------|------------------------|------------------------|-----------|--------|--------|
| | | | Perempuan | Laki-laki | | |
| Lama Bekerja | 0-5 | Count | 3 | 6 | 9 | |
| | | % within Jenis Kelamin | 6,5% | 7,6% | 7,2% | |
| | 6-10 | Count | 23 | 42 | 65 | |
| | | % within Jenis Kelamin | 50,0% | 53,2% | 52,0% | |
| | 11-15 | Count | 16 | 16 | 32 | |
| | | % within Jenis Kelamin | 34,8% | 20,3% | 25,6% | |
| | > 15 | Count | 4 | 15 | 19 | |
| | | % within Jenis Kelamin | 8,7% | 19,0% | 15,2% | |
| | Total | | Count | 46 | 79 | 125 |
| | | | % within Jenis Kelamin | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Sumber : Hasil Uji SPSS Versi 20

2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

a. Analisis Deskriptif Tentang Hubungan Legislatif dan Eksekutif (X_1)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENYUSUNAN APBD DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS APBD

(Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015)

Berdasarkan Tabel 5. Dibawah ini, jawaban responden tentang hubungan legislatif dan eksekutif dengan rata-rata skor 3.79, ini termasuk kategori setuju. Artinya responden setuju terhadap komunikasi antara eksekutif dan legislatif kurang berjalan dengan efektif

sesuai dengan yang diharapkan, Adanya kesenjangan informasi antara eksekutif dan legislatif, eksekutif dan legislatif belum mampu bekerja sama sesuai dengan yang telah ditentukan dan koordinasi yang terjadi antara eksekutif dan legislatif belum baik.

Tabel.5. Tanggapan Responden Tentang Hubungan Legislatif dan Eksekutif

| No | Pernyataan | Kategori | | | | | Jlh | Rata-rata | |
|------------|---|----------|------|------|-----|-----|-----|-----------|------|
| | | SS | S | N | TS | STS | | | |
| 1 | Komunikasi antara eksekutif dan legislatif kurang berjalan dengan efektif sesuai dengan yang diharapkan | Jlh | 26 | 45 | 26 | 23 | 5 | 125 | 3,51 |
| | | Skor | 130 | 180 | 78 | 46 | 5 | 439 | |
| 2 | Adanya Kesenjangan informasi antara eksekutif dan legislative | Jlh | 14 | 47 | 34 | 25 | 5 | 125 | 3,32 |
| | | Skor | 70 | 188 | 102 | 50 | 5 | 415 | |
| 3 | Eksekutif dan legislatif belum mampu bekerja sama sesuai dengan yang telah ditentukan | Jlh | 16 | 54 | 30 | 21 | 4 | 125 | 3,46 |
| | | Skor | 80 | 216 | 90 | 42 | 4 | 432 | |
| 4 | Koordinasi yang terjadi antara eksekutif dan legislatif belum baik | Jlh | 17 | 65 | 21 | 20 | 2 | 125 | 3,60 |
| | | Skor | 85 | 260 | 63 | 40 | 2 | 450 | |
| Jumlah | | | 365 | 844 | 333 | 178 | 16 | 1736 | 3,79 |
| Total Skor | | | 1825 | 3376 | 999 | 356 | 16 | 6572 | |

Sumber : Data Olahan, 2016

b. Analisis Deskriptif Transparansi Publik (X₂)

Berdasarkan Tabel 6, rata-rata skor jawaban responden tentang transparansi publik adalah 3.89, ini termasuk kategori setuju, artinya menurut responden dalam membuat suatu kegiatan terdapat pengumuman kebijakan anggaran yang telah

ditetapkan, masyarakat diberikan kemudahan untuk mengakses dokumen anggaran, laporan tahapan penyusunan APBD secara berkala disampaikan kepada publik dan tersedia fasilitas yang menyediakan informasi kepada publik.

Tabel.6. Tanggapan Responden Tentang Transparansi Publik

| No | Pernyataan | Kategori | | | | | Jlh | Rata-rata | |
|------------|---|----------|------|------|------|-----|-----|-----------|------|
| | | SS | S | N | TS | STS | | | |
| 1 | Dalam membuat suatu kegiatan terdapat pengumuman kebijakan anggaran yang telah ditetapkan | Jlh | 32 | 53 | 31 | 5 | 4 | 125 | 3,80 |
| | | Skor | 160 | 212 | 93 | 10 | 0 | 475 | |
| 2 | Masyarakat diberikan kemudahan untuk mengakses dokumen anggaran | Jlh | 16 | 53 | 29 | 23 | 4 | 125 | 3,43 |
| | | Skor | 80 | 212 | 87 | 46 | 4 | 429 | |
| 3 | Laporan tahapan penyusunan APBD secara berkala telah disampaikan kepada publik | Jlh | 22 | 47 | 27 | 23 | 6 | 125 | 3,45 |
| | | Skor | 110 | 188 | 81 | 46 | 6 | 431 | |
| 4 | Tersedia fasilitas atau sistem yang menyediakan informasi kepada publik | Jlh | 23 | 48 | 38 | 10 | 6 | 125 | 3,58 |
| | | Skor | 115 | 192 | 114 | 20 | 6 | 447 | |
| Jumlah | | | 465 | 804 | 375 | 122 | 16 | 1782 | 3,89 |
| Total Skor | | | 2325 | 3216 | 1125 | 244 | 16 | 6926 | |

Sumber : Data Olahan, 2016

c. Analisis Deskriptif Partipasi Masyarakat (X₃)

Berdasarkan Tabel 7, jawaban responden tentang partipasi masyarakat dengan rata-rata skor jawaban responden adalah 3.79, ini termasuk kategori setuju, artinya responden menyatakan masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah,

masyarakat memiliki ruang dan kapasitas untuk mempengaruhi dan menentukan kebijakan yang dibuat, masyarakat ikut mengontrol dan mengawasi terhadap kebijakan dan tindakan yang dibuat pemerintah dan usulan/suara rakyat selalu terakomodasi dengan baik.

Tabel.7. Tanggapan Responden Tentang Partipasi Masyarakat

| No | Pernyataan | Kategori | | | | | Jlh | Rata-rata | |
|------------|--|----------|------|------|------|-----|-----|-----------|------|
| | | SS | S | N | TS | STS | | | |
| 1 | Masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah | Jlh | 35 | 30 | 38 | 19 | 3 | 125 | 3,58 |
| | | Skor | 175 | 120 | 114 | 38 | 0 | | |
| 2 | Masyarakat memiliki ruang dan kapasitas untuk mempengaruhi dan menentukan kebijakan yang dibuat | Jlh | 10 | 47 | 42 | 25 | 1 | 125 | 3,32 |
| | | Skor | 50 | 188 | 126 | 50 | 1 | | |
| 3 | Masyarakat ikut mengontrol dan mengawasi terhadap kebijakan dan tindakan yang dibuat pemerintah | Jlh | 26 | 51 | 30 | 16 | 2 | 125 | 3,66 |
| | | Skor | 130 | 204 | 90 | 32 | 2 | | |
| 4 | Usulan/suara rakyat selalu terakomodasi dengan baik | Jlh | 13 | 54 | 29 | 24 | 5 | 125 | 3,37 |
| | | Skor | 65 | 216 | 87 | 48 | 5 | | |
| Jumlah | | | 420 | 728 | 417 | 168 | 8 | 1741 | 3,79 |
| Total Skor | | | 2100 | 2912 | 1251 | 336 | 8 | 6607 | |

Sumber : Data Olahan, 2016

d. Analisis Deskriptif Latar Belakang Pendidikan (X₄)

Berdasarkan Tabel 8, jawaban responden tentang latar belakang pendidikan dengan rata-rata skor jawaban responden adalah 3.60, ini termasuk kurang setuju, artinya responden tingkat pendidikan yang terkait penganggaran pada SKDP belum memadai, bidang pendidikan

staf/pegawai pada SKPD belum sesuai dengan keahliannya, kualitas pendidikan staf/pegawai belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan pegawai/staf yang bertugas menyusun APBD belum mengikuti pelatihan, *workshop*, atau seminar tentang penyusunan APBD

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENYUSUNAN APBD DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS APBD

(Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015)

Tabel.8. Tanggapan Responden Tentang Latar Belakang Pendidikan

| No | Pernyataan | Kategori | | | | | Jlh | Rata-rata | |
|------------|--|----------|------|------|------|-----|-----|-----------|------|
| | | SS | S | N | TS | STS | | | |
| 1 | Tingkat pendidikan yang terkait penganggaran pada SKDP memadai | Jlh | 13 | 58 | 37 | 13 | 4 | 125 | 3,47 |
| | | Skor | 65 | 232 | 111 | 26 | 0 | 434 | |
| 2 | Bidang pendidikan staf/pegawai pada SKPD sudah sesuai dengan keahliannya | Jlh | 3 | 43 | 43 | 31 | 5 | 125 | 3,06 |
| | | Skor | 15 | 172 | 129 | 62 | 5 | 383 | |
| 3 | Kualitas pendidikan staf/pegawai sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan | Jlh | 9 | 22 | 53 | 31 | 10 | 125 | 2,91 |
| | | Skor | 45 | 88 | 159 | 62 | 10 | 364 | |
| 4 | Pegawai/staf yang bertugas menyusun APBD telah mengikuti pelatihan, <i>workshop</i> , atau seminar tentang penyusunan APBD | Jlh | 28 | 44 | 31 | 21 | 1 | 125 | 3,62 |
| | | Skor | 140 | 176 | 93 | 42 | 1 | 452 | |
| Jumlah | | | 265 | 668 | 492 | 192 | 16 | 1633 | 3,60 |
| Total Skor | | | 1325 | 2672 | 1476 | 384 | 16 | 5873 | |

Sumber : Data Olahan, 2016

e. Analisis Deskriptif Kualitas APBD

Berdasarkan Tabel 9, jawaban responden tentang kualitas APBD dengan rata-rata jawaban responden adalah 3.78, ini termasuk kategori setuju. Artinya responden setuju terhadap kualitas anggaran yang dibuat telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi yang telah ditentukan, alokasi anggaran

sesuai dengan hasil yang didapatkan pada tahun sebelumnya, melaporkan pengungkapan atas laporan keuangan yang tidak memadai dan ditutup-tutupi, alokasi anggaran adil dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan proses penganggaran sesuai dengan aspirasi.

Tabel 9. Jawaban Responden Tentang Kualitas APBD

| No | Pernyataan | Kategori | | | | | Jumlah | Rata-rata | |
|------------|---|----------|------|------|------|-----|--------|-----------|------|
| | | SS | S | N | TS | STS | | | |
| 1 | Kualitas anggaran yang dibuat telah sesuai dengan nilai-nilai ekonomi yang telah ditentukan | Jlh | 10 | 51 | 43 | 21 | 0 | 125 | 3,40 |
| | | Skor | 50 | 204 | 129 | 42 | 0 | 425 | |
| 2 | Alokasi anggaran sesuai dengan hasil yang didapatkan pada tahun sebelumnya | Jlh | 12 | 44 | 43 | 22 | 4 | 125 | 3,30 |
| | | Skor | 60 | 176 | 129 | 44 | 4 | 413 | |
| 3 | Melaporkan pengungkapan atas laporan keuangan yang tidak memadai dan ditutup-tutupi | Jlh | 16 | 46 | 47 | 12 | 4 | 125 | 3,46 |
| | | Skor | 80 | 184 | 141 | 24 | 4 | 433 | |
| 4 | Alokasi anggaran harus adil dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan | Jlh | 38 | 42 | 39 | 6 | 0 | 125 | 3,90 |
| | | Skor | 190 | 168 | 117 | 12 | 0 | 487 | |
| 5 | Proses penganggaran sesuai dengan aspirasi masyarakat | Jlh | 21 | 45 | 50 | 8 | 1 | 125 | 3,62 |
| | | Skor | 105 | 180 | 150 | 16 | 1 | 452 | |
| Jumlah | | | 485 | 912 | 666 | 138 | 9 | 2210 | 3,78 |
| Total Skor | | | 2425 | 3648 | 1998 | 276 | 9 | 8356 | |

Sumber : Data Olahan, 2016

f. Analisis Deskriptif Tentang Proses Penyusunan APBD

Berdasarkan Tabel 10, jawaban responden tentang proses penyusunan APBD dengan rata-rata skor jawaban responden adalah 3.73, ini termasuk kategori setuju. Artinya responden

setuju terhadap penyusunan APBD relevan, secara logis dan langsung berhubungan dengan tujuan dan sasaran unit kerja, program atau kegiatan, penyusunan APBD mudah dipahami,

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENYUSUNAN APBD DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS APBD

(Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015)

dapat dikomunikasikan dengan jelas, penyusunan APBD konsisten, digunakan secara seragam dalam perencanaan penganggaran, sistem akuntansi dan pelaporan, dapat

dibandingkan, dapat menunjukkan perkembangan, perbedaan kinerja kegiatan dan andal (reliabel) diperoleh dari sistem data yang terkendali dan dapat diverifikasi.

Tabel.10. Jawaban Responden Tentang Proses Penyusunan APBD

| No | Pernyataan | | Kategori | | | | | Jlh | Rata-rata |
|------------|--|------|----------|------|------|-----|-----|------|-----------|
| | | | SS | S | N | TS | STS | | |
| 1 | Penyusunan anggaran relevan, secara logis dan langsung berhubungan dengan tujuan dan sasaran unit kerja, program atau kegiatan | Jlh | 15 | 53 | 49 | 8 | 0 | 125 | 3,60 |
| | | Skor | 75 | 212 | 147 | 16 | 0 | 450 | |
| 2 | Penyusunan anggaran mudah dipahami, dapat dikomunikasikan dengan jelas | Jlh | 13 | 54 | 54 | 4 | 0 | 125 | 3,61 |
| | | Skor | 65 | 216 | 162 | 8 | 0 | 451 | |
| 3 | Penyusunan anggaran konsisten, digunakan secara seragam dalam perencanaan penganggaran, sistem akuntansi dan pelaporan | Jlh | 15 | 58 | 45 | 6 | 1 | 125 | 3,64 |
| | | Skor | 75 | 232 | 135 | 12 | 1 | 455 | |
| 4 | Dapat dibandingkan, dapat menunjukkan perkembangan dan perbedaan kinerja dari program atau kegiatan | Jlh | 10 | 51 | 55 | 9 | 0 | 125 | 3,50 |
| | | Skor | 50 | 204 | 165 | 18 | 0 | 437 | |
| 5 | Andal (reliabel) diperoleh dari sistem data yang terkendali dan dapat diverifikasi | Jlh | 9 | 54 | 55 | 3 | 4 | 125 | 3,49 |
| | | Skor | 45 | 216 | 165 | 6 | 4 | 436 | |
| Jumlah | | | 310 | 1080 | 774 | 60 | 5 | 2229 | 3,73 |
| Total Skor | | | 1550 | 4320 | 2322 | 120 | 5 | 8317 | |

Sumber : Data Olahan, 2016

3. Hasil Analisa Data

a. Hasil Uji Instrumen

• Hasil Uji Validitas Kuesioner

Berdasarkan Tabel 11.dibawah ini, dapat dilihat bahwa nilai hasil uji validitas berada diatas nilai r tabel (0.175). Ini berarti item pertanyaan

kuesioner telah dapat mengukur variabel yang akan diuji dalam penelitian ini secara valid.

Tabel 11. Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas APBD

| Kualitas APBD | R Hitung | R tabel | Keterangan |
|---------------|----------|---------|------------|
| butir 1 | 0,589** | 0.175 | Valid |
| butir 2 | 0,466** | 0.175 | Valid |
| butir 3 | 0,618** | 0.175 | Valid |
| butir 4 | 0,679** | 0.175 | Valid |
| butir 5 | 0,703** | 0.175 | Valid |

Sumber : Hasil Uji SPSS Versi 20

Berdasarkan Tabel 12.dibawah ini, dapat dilihat bahwa nilai hasil uji validitas berada diatas nilai r tabel (0.175). Ini berarti item pertanyaan

kuesioner penelitian telah dapat mengukur variabel yang akan diuji dalam penelitian ini secara valid.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENYUSUNAN APBD DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS APBD

(Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015)

Tabel 12. Hasil Uji Validitas Proses Penyusunan APBD

| Proses Penyusunan APBD | R Hitung | R tabel | Keterangan |
|------------------------|----------|---------|------------|
| butir 1 | 0,734** | 0.175 | Valid |
| butir 2 | 0,783** | 0.175 | Valid |
| butir 3 | 0,744** | 0.175 | Valid |
| butir 4 | 0,742** | 0.175 | Valid |
| butir 5 | 0,725** | 0.175 | Valid |

Sumber : Hasil Uji SPSS Versi 20

Berdasarkan Tabel 13.dibawah ini, dapat dilihat bahwa nilai hasil uji validitas berada diatas nilai r tabel (0.175). Ini berarti item pertanyaan

kuesioner penelitian telah dapat mengukur variabel yang akan diuji dalam penelitian ini secara valid.

Tabel 13. Hasil Uji Validitas Variabel Hubungan Legislatif dan Eksekutif

| Hubungan Legislatif dan Eksekutif | R Hitung | R tabel | Keterangan |
|-----------------------------------|----------|---------|------------|
| butir 1 | 0,870** | 0.175 | Valid |
| butir 2 | 0,838** | 0.175 | Valid |
| butir 3 | 0,898** | 0.175 | Valid |
| butir 4 | 0,767** | 0.175 | Valid |

Sumber : Hasil Uji SPSS Versi 20

Berdasarkan Tabel 14.dibawah ini, dapat dilihat bahwa nilai hasil uji validitas berada diatas nilai r tabel (0.175). Ini berarti item pertanyaan

kuesioner penelitian telah dapat mengukur variabel yang akan diuji dalam penelitian ini secara valid.

Tabel 14. Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Publik

| Transparansi Publik | R Hitung | R tabel | Keterangan |
|---------------------|----------|---------|------------|
| butir 1 | 0,771** | 0.175 | Valid |
| butir 2 | 0,809** | 0.175 | Valid |
| butir 3 | 0,835** | 0.175 | Valid |
| butir 4 | 0,781** | 0.175 | Valid |

Sumber : Hasil Uji SPSS Versi 20

Berdasarkan Tabel 15.dibawah ini, dapat dilihat bahwa nilai hasil uji validitas berada diatas nilai r tabel (0.175). Ini berarti item pertanyaan

kuesioner penelitian telah dapat mengukur variabel yang akan diuji dalam penelitian ini secara valid.

Tabel 15. Hasil Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat

| Partisipasi Masyarakat | R Hitung | R tabel | Keterangan |
|------------------------|----------|---------|------------|
| butir 1 | 0,739** | 0.175 | Valid |
| butir 2 | 0,676** | 0.175 | Valid |
| butir 3 | 0,814** | 0.175 | Valid |
| butir 4 | 0,659** | 0.175 | Valid |

Sumber : Hasil Uji SPSS Versi 20

Berdasarkan Tabel 16. dibawah ini, dapat dilihat bahwa nilai hasil uji validitas berada diatas nilai r tabel (0.175). Ini berarti item pertanyaan

kuesioner penelitian telah dapat mengukur variabel yang akan diuji dalam penelitian ini secara valid.

Tabel 16. Hasil Uji Validitas Variabel Latar Belakang Pendidikan

| Latar Belakang Pendidikan | R Hitung | R tabel | Keterangan |
|---------------------------|----------|---------|------------|
| butir 1 | 0,728** | 0.175 | Valid |
| butir 2 | 0,808** | 0.175 | Valid |
| butir 3 | 0,637** | 0.175 | Valid |
| butir 4 | 0,781** | 0.175 | Valid |

Sumber : Hasil Uji SPSS Versi 20

• **Hasil Uji Reliabilitas (Reliability)**

Berdasarkan kriteria Tabel 17. dibawah ini maka dapat dinyatakan bahwa alat ukur yang digunakan dalam

penelitian ini telah menunjukkan data yang reliabel dan dapat digunakan sebagai alat untuk variabel penelitian.

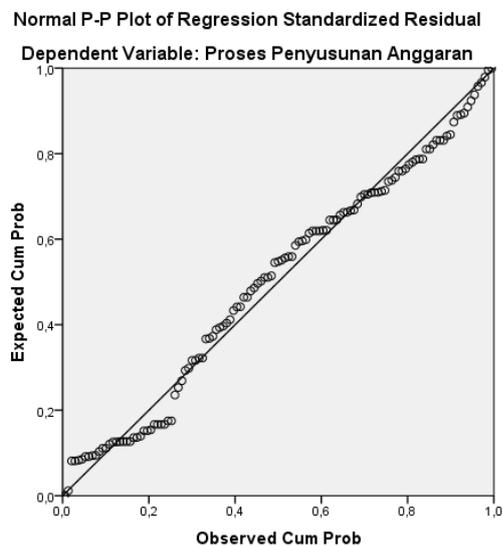
Tabel 17. Hasil Uji Reliabilitas

| No | Item | Hasil Reliability (Alpha) | | Standar | Keterangan |
|----|-----------------------------------|---------------------------|--------|---------|------------|
| | | Harapan | Respon | | |
| 1 | Hubungan Legislatif dan Eksekutif | 0.6 | 0.721 | 0.6 | Reliabel |
| 2 | Transparansi Publik | 0.6 | 0.779 | 0.6 | Reliabel |
| 3 | Partipasi Masyarakat | 0.6 | 0.865 | 0.6 | Reliabel |
| 4 | Latar Belakang Pendidikan | 0.6 | 0.812 | 0.6 | Reliabel |
| 5 | Kualitas APBD | 0.6 | 0.692 | 0.6 | Reliabel |
| 6 | Proses Penyusunan APBD | 0.6 | 0.719 | 0.6 | Reliabel |

Sumber : Hasil Uji SPSS Versi 20

b. **Hasil Uji Asumsi Klasik**

• **Hasil Uji Normalitas Data**



Gambar 2. Normalitas data

Berdasarkan Gambar 2. diatas, dapat dilihat bahwa sebaran data terdapat disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, oleh karena maka model regresi, variabel independen dan variabel dependen

memenuhi asumsi normalitas data ini berarti bahwa data tersebut normal dan layak untuk diuji.

Untuk menguji hasil dari grafik *Normal P-P plot* diatas maka digunakan Uji Kolmogorov Smirnov. Hasil

perhitungan uji kolmogorov smirnov dengan menggunakan program SPSS

Versi 20 dapat dilihat pada Tabel 18. berikut:

Tabel 18. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 81 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | 0E-7 |
| | Std. Deviation | 2,18692734 |
| | Absolute | ,083 |
| Most Extreme Differences | Positive | ,061 |
| | Negative | -,083 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | ,750 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,628 |

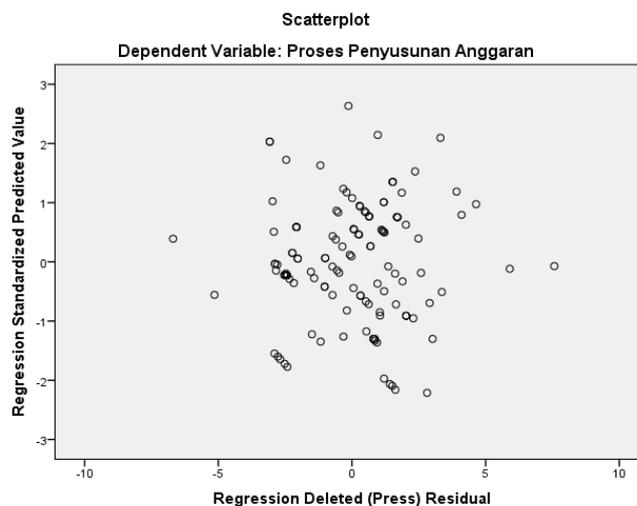
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Uji SPSS Versi 20

Berdasarkan Tabel 18.diatas, dapat dilihat bahwa nilai hasil uji kolmogorov smirnov > 0,05,artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal

baku. Berarti data yang kita uji normal.Dengan demikian pengujian statistik dapat dilakukan dalam penelitian ini untuk memenuhi hipotesis penelitian.

• Hasil Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas setelah transformasi

Berdasarkan grafik di atas setelah dilakukan transformasi, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

heterokedastisitas, jadi sebaran data dikatakan baik.

Dikarenakan uji heteroskedastisitas menggunakan scatterplot sangat lemah karena hanya mengandalkan analisis visual. Untuk mendapatkan kepastian perlu uji hipotesis yaitu menggunakan uji Glejser.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENYUSUNAN APBD DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS APBD
(Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015)

Tabel 19. Hasil Uji Glejser

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 1,220 | ,753 | | 1,620 | ,108 |
| Hub. Legislatif dan Eksekutif | ,048 | ,037 | ,135 | 1,297 | ,197 |
| 1 Transparansi Publik | -,016 | ,050 | -,042 | -,313 | ,755 |
| Partisipasi Masyarakat | ,104 | ,058 | ,245 | 1,785 | ,077 |
| Latarbelakang Pendidikan | ,037 | ,046 | ,086 | ,801 | ,424 |
| Kualitas APBD | -,113 | ,051 | -,251 | -1,225 | ,058 |

a. Dependent Variable: Abs_UT
Sumber : Hasil Uji SPSS Versi 20

Dari hasil perhitungan nilai diperoleh nilai signifikansi semua variabel independen >0,05, sehingga

dapat disimpulkan bahwa bahwa tidak terjadi heterokedastisitas, jadi sebaran data dikatakan baik.

4. Pengujian Hipotesis

Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*) sebagai berikut:

$$Z = \rho_{x_1z}X_1 + \rho_{x_2z}X_2 + \rho_{x_3z}X_3 + \rho_{x_4z}X_4 + \varepsilon_1 \dots\dots\dots (1)$$

$$Y = \rho_{x_1y}X_1 + \rho_{x_2y}X_2 + \rho_{x_3y}X_3 + \rho_{x_4y}X_4 + \rho_{zy}Y + \varepsilon_2 \dots\dots\dots (2)$$

Tabel 20. Hasil Pengujian Persamaan Model 1

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 10.758 | 1.200 | | 8.969 | .000 |
| Hubungan Eksekutif dan Legislatif (X1) | -,129 | .070 | -,159 | -1.839 | .068 |
| Transparansi Publik (X2) | .421 | .091 | .491 | 4.618 | .000 |
| Partisipasi Masyarakat (X3) | .185 | .112 | .191 | 1.649 | .102 |
| Latar Belakang Pendidikan (X4) | .020 | .087 | .020 | .228 | .820 |

a. Dependent Variable: Proses Penyusunan APBD (Z)
Sumber : Hasil Uji SPSS Versi 20

Sehingga persamaan struktural untuk model 1 tersebut adalah :

$$Z = - 0.159 + 0.491 + 0.191 + 0.020$$

Tabel 21. Hasil Pengujian Persamaan Model 2

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 3.631 | 1.285 | | 2.825 | .006 |
| Hubungan Eksekutif dan Legislatif (X1) | .188 | .059 | .240 | 3.199 | .002 |
| Transparansi Publik (X2) | .151 | .082 | .182 | 1.845 | .068 |
| Partisipasi Masyarakat (X3) | -,090 | .094 | -,095 | -,952 | .343 |
| Latar Belakang Pendidikan (X4) | .216 | .072 | .225 | 3.010 | .003 |
| Proses Penyusunan APBD (Z) | .431 | .076 | .445 | 5.696 | .000 |

a. Dependent Variable: Kualitas APBD (Y)
Sumber : Hasil Uji SPSS Versi 20

Sehingga persamaan struktural untuk model 2 tersebut adalah :

$$Y = 0.240 + 0.182 + -0.095 + 0.225 + 0.445$$

Dari tabel di atas dapat diformulasikan persamaan sebagai berikut:

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENYUSUNAN APBD DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS APBD

(Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015)

- a. Pengaruh langsung
1. Pengaruh langsung Hubungan Eksekutif dan Legislatif (X_1) terhadap Proses Penyusunan APBD (Z)
Nilai signifikansi X_1 sebesar $0.068 < 0.10$, ini berarti secara langsung terdapat pengaruh signifikan X_1 terhadap Z pada derajat kepercayaan 10%.
 2. Pengaruh langsung Transparansi Publik (X_2) terhadap Proses Penyusunan APBD (Z)
Nilai signifikansi X_2 sebesar $0.000 < 0.05$, ini berarti secara langsung terdapat pengaruh signifikan X_2 terhadap Z pada derajat kepercayaan 5%.
 3. Pengaruh langsung Partipasi Masyarakat (X_3) terhadap Proses Penyusunan APBD (Z)
Nilai signifikansi X_3 sebesar $0.102 > 0.10$, ini berarti secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X_3 terhadap Z.
 4. Pengaruh langsung Latar Belakang Pendidikan (X_4) terhadap Proses Penyusunan APBD (Z)
Nilai signifikansi X_4 sebesar $0.820 > 0.10$, ini berarti secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X_4 terhadap Z.
 5. Pengaruh langsung Hubungan Eksekutif dan Legislatif (X_1) terhadap Kualitas APBD (Y)
Nilai signifikansi X_1 sebesar $0.002 < 0.05$, ini berarti secara langsung terdapat pengaruh signifikan X_1 terhadap Y pada derajat kepercayaan 5%.
 6. Pengaruh langsung Transparansi Publik (X_2) terhadap Kualitas APBD (Y)
Nilai signifikansi X_2 sebesar $0.068 < 0.10$, ini berarti secara langsung terdapat pengaruh signifikan X_2 terhadap Y pada derajat kepercayaan 10%.
 7. Pengaruh langsung Partipasi Masyarakat (X_3) terhadap Kualitas APBD (Y)
Nilai signifikansi X_3 sebesar $0.343 > 0.10$, ini berarti secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X_3 terhadap Y.
 8. Pengaruh langsung Latar Belakang Pendidikan (X_4) terhadap Kualitas APBD (Y)
Nilai signifikansi X_4 sebesar $0.003 < 0.05$, ini berarti secara langsung terdapat pengaruh signifikan X_4 terhadap Y pada derajat kepercayaan 5%.
 9. Pengaruh langsung Proses Penyusunan Anggaran (Z) terhadap Kualitas APBD (Y)
Nilai signifikansi Z sebesar $0.000 < 0.05$, ini berarti secara langsung terdapat pengaruh signifikan Z terhadap Y pada derajat kepercayaan 5%.
- b. Pengaruh Tidak Langsung
1. Pengaruh tidak langsung dari Hubungan Legislatif dan Eksekutif terhadap Kualitas APBD melalui Proses Penyusunan Anggaran (Koefisien X_1Y)
 $X_1 \rightarrow Z \rightarrow Y = (-0.159)(0.445) = -0.071$
 2. Pengaruh langsung dari Transparansi Publik terhadap Kualitas APBD melalui Proses Penyusunan Anggaran (Koefisien X_2Y)
 $X_2 \rightarrow Z \rightarrow Y = (0.491)(0.445) = 0.219$
 3. Pengaruh tidak langsung dari Partipasi Masyarakat terhadap Kualitas APBD melalui Proses Penyusunan Anggaran (Koefisien X_3Y)
 $X_3 \rightarrow Z \rightarrow Y = (0.191)(0.445) = 0.085$
 4. Pengaruh langsung dari Latar Belakang Pendidikan terhadap Kualitas APBD melalui Proses

Penyusunan Anggaran (Koefisien X_4Y)

$$X_4 \rightarrow Z \rightarrow Y = (0.020) (0.445) = 0.009$$

5. Hasil Statistik Analisis Jalur

a. Hasil Statistik Pengaruh Hubungan Legislatif dan Eksekutif Terhadap Kualitas APBD

Hasil pengolahan tersebut dapat dilihat pada lampiran sedangkan ringkasannya dapat dilihat dalam Tabel 22.berikut ini:

Tabel 22. Hasil Path Analysis Hubungan Legislatif Dan Eksekutif Terhadap Kualitas APBD

| Variabel Independen | t_{hitung} | t_{tabel} | Signifikan | Keterangan |
|-----------------------------------|--------------|-------------|------------|-------------------------|
| Hubungan Legislatif dan Eksekutif | 3.199 | 1.990 | 0.002 | H ₁ diterima |

Sumber : Hasil Uji SPSS Versi 20

Dari Tabel 22.diatas memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan hubungan legislatif dan eksekutif terhadap kualitasAPBDdi Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015. Hal ini dibuktikan melalui nilai signifikansi

yang kurang dari 0,05 ($\alpha = 5\%$) yaitu sebesar 0.002. Ini berarti penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan hubungan legislatif dan eksekutifberpengaruh terhadap kualitasAPBD, dengan demikian hipotesis pertama diterima.

b. Hasil Statistik Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Kualitas APBD

Hasil pengolahan tersebut dapat dilihat pada lampiran sedangkan ringkasannya dapat dilihat dalam Tabel 23.berikut ini:

Tabel 23. Hasil Path Analysis Transparansi Publik Terhadap Kualitas APBD

| Variabel Independen | t_{hitung} | t_{tabel} | Signifikan | Keterangan |
|---------------------|--------------|-------------|------------|-------------------------|
| Transparansi Publik | 1.845 | 1.990 | 0.068 | H ₂ diterima |

Sumber : Hasil Uji SPSS Versi 20

Dari Tabel 23.diatas memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara transparansi publik terhadap kualitasAPBDdi Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015. Untuk derajat signifikansi 95% transparansi publik tidak signifikan

terhadap kualitasAPBD tapi untuk derajat signifikansi 90% transparansi publik signifikan terhadap kualitasAPBD, hal ini dibuktikan melalui nilai $\alpha < 0,10$ yaitu sebesar 0.068, dengan demikian hipotesis kedua diterima.

c. Hasil Statistik Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas APBD

Hasil pengolahan tersebut dapat dilihat pada lampiran sedangkan ringkasannya dapat dilihat dalam Tabel 24.berikut ini:

Tabel 24. Hasil Path Analysis Partisipasi Masyarakat Terhadap Kualitas APBD

| Variabel Independen | t_{hitung} | t_{tabel} | Signifikan | Keterangan |
|------------------------|--------------|-------------|------------|------------------------|
| Partisipasi masyarakat | -0.952 | 1.990 | 0.343 | H ₃ ditolak |

Sumber : Hasil Uji SPSS Versi 20

Dari Tabel 24 diatas memperlihatkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi masyarakat terhadap

kualitasAPBDdi Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015. Hal ini dibuktikan melalui nilai signifikansi yang lebih besar dari 0.10 ($\alpha = 10\%$)

yaitu sebesar 0.343, dengan demikian hipotesis ketiga ditolak.

d. Hasil Statistik Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kualitas APBD

Hasil pengolahan tersebut dapat ringkasannya dapat dilihat dalam Tabel dilihat pada lampiran sedangkan 25.berikut ini

Tabel 25. Hasil Path Analysis Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kualitas APBD

| Variabel Independen | t _{hitung} | t _{tabel} | Signifikan | Keterangan |
|---------------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Latar belakang pendidikan | 3.010 | 1.990 | 0.003 | H ₄ diterima |

Sumber : Hasil Uji SPSS Versi 20

Dari Tabel 25.diatas memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara latar belakang pendidikan terhadap kualitas APBD di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015. Hal ini dibuktikan melalui nilai signifikansi

yang kurang dari 0,05 ($\alpha = 5\%$) yaitu sebesar 0.003. Ini berarti penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kualitas APBD, dengan demikian hipotesis keempat diterima.

e. Analisis Pengaruh Proses Penyusunan Anggaran Terhadap Kualitas APBD

Hasil pengolahan tersebut dapat ringkasannya dapat dilihat dalam Tabel dilihat pada lampiran sedangkan 26.berikut ini:

Tabel 26. Hasil Path Analysis Proses Penyusunan APBD Terhadap Kualitas APBD

| Variabel Independen | t _{hitung} | t _{tabel} | Signifikan | Keterangan |
|----------------------------|---------------------|--------------------|------------|-------------------------|
| Proses Penyusunan Anggaran | 5.696 | 1.990 | 0.000 | H ₅ diterima |

Sumber : Hasil Uji SPSS Versi 20

Dari Tabel 26.diatas memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara proses penyusunan APBD terhadap kualitas APBD. Hal ini dibuktikan melalui nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 ($\alpha =$

5%) yaitu sebesar 0.000. Ini berarti penelitian ini menerima hipotesis yang menyatakan proses penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kualitas APBD, dengan demikian hipotesis kelima diterima.

f. Hasil Statistik Pengaruh Hubungan Legislatif dan Eksekutif Terhadap Kualitas APBD Yang Dimediasi oleh Proses Penyusunan APBD

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa hubungan legislatif dan eksekutif berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas APBD yang dimediasi oleh proses penyusunan APBD, maka diuji dengan menggunakan uji Sobel test sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Sab &= \sqrt{(b^2 Sa^2 + a^2 Sb^2)} \\
 &= \sqrt{(0.445^2 \times 0.059^2 + 0.240^2 \times 0.076^2)} \\
 &= 0.03197
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 Z &= ab/Sab \\
 &= (0.240 \times 0.445)/(0.03197) \\
 &= 3.34073
 \end{aligned}$$

Dari hasil uji Sobel test diatas menunjukkan $Z = 3.34073 > 1.96$, dengan menggunakan perhitungan online melalui situs quantpsy.org/sobel/sobel.htm diperoleh $Z = 3.34073 > 1.96$ dan nilai $p = 0.0084 < 0.05$. Ini artinya untuk derajat signifikansi 95% atau derajat kepercayaan (α) = 5% proses

penyusunan APBD mampu memediasi pengaruh hubungan legislatif dan eksekutif terhadap kualitas APBD,

dengan demikian hipotesis keenam diterima.

g. Hasil Statistik Pengaruh Transparansi Publik Terhadap Kualitas APBD Yang Dimediasi oleh Proses Penyusunan APBD

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa transparansi publik berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas APBD yang dimediasi oleh proses penyusunan APBD, maka diuji dengan menggunakan uji Sobel test sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Sab &= \sqrt{(b^2 Sa^2 + a^2 Sb^2)} \\ &= \sqrt{(0.445^2 \times 0.082^2 + 0.182^2 \times 0.076^2)} \\ &= 0.03902 \\ Z &= ab/Sab \\ &= (0.182 \times 0.445)/(0.03902) \\ &= 2.07541 \end{aligned}$$

Dari hasil uji Sobel test menunjukkan $Z = 2.07541 > 1.96$, dengan menggunakan perhitungan online melalui situs quantpsy.org/sobel/sobel.htm diperoleh $Z = 2.07541 > 1.96$ dan nilai $\rho = 0.03795 < 0.05$. Ini artinya untuk derajat signifikansi 95% atau derajat kepercayaan (α) = 5% proses penyusunan APBD mampu memediasi pengaruh transparansi publik terhadap kualitas APBD, dengan demikian hipotesis ketujuh diterima.

h. Hasil Statistik Pengaruh Partipasi Masyarakat Terhadap Kualitas APBD Yang Dimediasi oleh Proses Penyusunan APBD

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas APBD yang dimediasi oleh proses penyusunan APBD di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015, maka diuji dengan menggunakan uji Sobel test sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Sab &= \sqrt{(b^2 Sa^2 + a^2 Sb^2)} \\ &= \sqrt{(0.445^2 \times 0.094^2 + (-0.095)^2 \times 0.076^2)} \\ &= 0.04245 \\ Z &= ab/Sab \\ &= (-0.095 \times 0.445)/(0.04245) \\ &= -0.99591 \end{aligned}$$

Hasil uji Sobel test menunjukkan $Z = -0.00591 < 1.645$, sedangkan dengan menggunakan perhitungan online melalui situs quantpsy.org/sobel/sobel.htm diperoleh $Z = -0.99591 < 1.645$ dan nilai $\rho = 0.31929 > 0.10$. Ini artinya untuk derajat signifikansi 95% atau derajat kepercayaan (α) = 5% dan derajat signifikansi 90% atau derajat kepercayaan (α) = 10% proses penyusunan APBD tidak mampu memediasi pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas APBD, dengan demikian hipotesis kedelapan ditolak.

i. Hasil Statistik Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kualitas APBD yang Dimediasi oleh Proses Penyusunan APBD

Untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas APBD yang dimediasi oleh proses penyusunan APBD berpengaruh, maka diuji dengan

menggunakan uji Sobel test sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Sab &= \sqrt{(b^2 Sa^2 + a^2 Sb^2)} \\ &= \sqrt{(0.445^2 \times 0.072^2 + 0.225^2 \times 0.076^2)} \\ &= 0.03632 \\ Z &= ab/Sab \end{aligned}$$

$$= (0.225 \times 0.445) / (0.03632)$$

$$= 2.75692$$

Dari hasil uji Sobel test menunjukkan $Z = 2.75692 > 1.96$, dengan menggunakan perhitungan online melalui situs quantpsy.org/sobel/sobel.htm diperoleh $Z = 2.75692 > 1.96$ dan nilai $\rho =$

$0.00584 < 0.05$. Ini artinya untuk derajat signifikansi 95% atau derajat kepercayaan (α) = 5% proses penyusunan APBD mampu memediasi pengaruh latar belakang pendidikan terhadap kualitas APBD, dengan demikian hipotesis kesembilan diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015. Semakin baik hubungan legislatif dan eksekutif maka akan menentukan semakin lancar proses penyusunan APBD dan kualitas APBD yang dihasilkanpun akan baik.
- Transparansi publik berpengaruh terhadap kualitas APBD di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015. Dengan dokumen anggaran yang mudah diakses serta dapat dimengerti maka semakin baik kualitas APBD dan semakin baik juga program-program pembangunan untuk kepentingan publik.
- Partipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap kualitas APBD di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015. Dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBD tidak mempengaruhi kualitas APBD.
- Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kualitas APBD di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015. Dengan adanya staf/pegawai yang ditempatkan sesuai dengan bidang ilmunya, serta adanya pelatihan/workshop tentang anggaran maka kualitas APBD yang dihasilkan akan semakin baik.
- Proses penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kualitas APBD di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015. Proses penyusunan anggaran menentukan kualitas APBD, semakin baik proses penyusunan anggaran maka APBD semakin berkualitas.
- Proses penyusunan APBD mampu memediasi hubungan legislatif dan eksekutif terhadap kualitas APBD di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.
- Proses penyusunan APBD mampu memediasi hubungan transparansi publik terhadap kualitas APBD di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.
- Proses penyusunan APBD tidak mampu memediasi hubungan partisipasi masyarakat terhadap kualitas APBD di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PROSES PENYUSUNAN APBD DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS APBD

(Studi Di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015)

- Proses penyusunan APBD mampu memediasi hubungan latar belakang pendidikan terhadap kualitas APBD

2. Saran

a. Untuk Birokrasi Pemerintah

Pemerintah diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat untuk memiliki ruang dan kapasitas dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan APBD.

b. Untuk Masyarakat

Masyarakat diharapkan untuk dapat mengoptimalkan peran dari lembaga institusi lokal non pemerintahan seperti LSM, media masa, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan partai politik. Jika

di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015.

peran dari lembaga ini dapat optimal maka akan berdampak pada meningkatkan kualitas APBD karena dalam setiap kebijakan masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Sedangkan untuk pihak

c. Untuk Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan pengaruh secara langsung hubungan eksekutif dan legislatif, transparansi publik, partisipasi masyarakat, dan langsung latar belakang pendidikan terhadap proses penyusunan APBD. Karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis tidak bisa membahasnya dipenelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Analisa.2014. *Indikasi Penyelewangan APBD Riau* 2015.<http://analisadaily.com>

Didik G,S. 2009. *Persoalan Klasik Penyusunan APBD*. <http://artikel-media.blogspot.com>

Mesdiyono. 2008. Faktor-faktor penghambat penyusunan APBD Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, 2004 – 2008. *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Sartiko, S.W. 2011. Pengaruh Ketidakmayoritasan Partai Politik Kepala Daerah dalam DPRD (Dividen Government) terhadap Keterlambatan Penetapan APBD (Budget Delay) Berdasarkan

Perspektif Ekonomi Politik.*Tesis*.Jakarta : Univesitas Indonesia.

Sopannah dan Mardiasmo, 2003, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah.*Simposium Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober di Surabaya*.

Subechan, I.H &Haryono, B.S. 2014.Analisis Faktor-faktor Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Kudus.Universitas Brawijaya. *Wacana – Vol. 17, No. 1 (2014)*.

Sulistoni, G., 2003, *Fiqh korupsi: Amanah Vs Kekuasaan*, SOMASI, Nusa Tenggara Barat.

Sumarto, H.S.2009.*Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Sutoro, E.2004.*Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: APMD Press

Syahbudi. 2012. Komunikasi Politik Antara Eksekutif Dan Legislatif dalam Penyusunan RAPBD Kabupaten Indragiri Hilir (Studi: Hubungan Pemerintah Daerah Dengan DPRD Dalam Penyusunan APBD).*Tugas Akhir Program Magister*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Usman, T.H. 2014.*Menyelamatkan Anggaran Rakyat*.
<http://fitrariau.org>

Wahyuni, S. 2011. Analisis Faktor-Faktor Keterlambatan dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus di Kabupaten Sukamara).*Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Wangi, C.A.P&Ritonga I.T, 2010. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010).*Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.